

Buletin



PARLEMENTARIA

80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

KETUA
Terima WNI
yang Pernah
Ditahan
Myanmar

KORKESRA
Negara
Harus Hadir
Tangani PHK

Sekolah Inklusi Kekurangan Guru

Nomor 1354/I/VIII/2025 Agustus 2025



9 772614 339005





Sekolah Inklusi Kekurangan Guru

Masalah kekurangan guru, terutama untuk sekolah inklusi menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Hal tersebut mengemuka usai Tim Kunjungan Kerja Komisi X mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, yang hanya memiliki 86 guru dengan 200 siswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menilai jumlah tersebut masih jauh dari ideal, terutama karena mayoritas siswa merupakan anak-anak dengan autisme yang membutuhkan perhatian khusus. “Anak autis itu satu siswa (idealnya) satu guru, maka ketika sekarang mayoritas muridnya adalah anak yang berkebutuhan khusus, autis tadi, maka memang dirasa ada kekurangan (guru),” kata MY Esti di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (25/7).

Selain untuk sekolah inklusi, sekolah umum menurut Esti juga masih mengalami kekurangan guru khusus untuk siswa inklusi, terlebih saat ini sekolah umum juga wajib menerima anak



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, saat mengunjungi SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri 1 Bantul, Jumat (25/7/2025).

berkebutuhan khusus. “Belum ada guru yang kemudian itu adalah ASN begitu yang kemudian bisa membimbing mereka yang

kemudian harus melalui proses-proses kursus dan yang lain sebagainya,” ungkapnya.

Menurutnya perlu ada peluang pendaftaran ASN (Aparatur Sipil Negara) guru inklusi, agar dapat mengisi kekosongan tersebut. “Guru-guru inklusi itu harus memang mempunyai jalur-jalur pendidikan khusus yang kemudian bisa ditempatkan dan diberikan ruang untuk pendaftarannya. Nah sementara sekarang kan honorer *close*, semua *close*, nah itu yang perlu kita pikirkan,” jelas Legislator Dapil DIY tersebut.

Sementara itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkap, selain kekurangan guru dan distribusi guru yang belum merata, permasalahan anggaran juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan. **bia/aha**



Terima WNI yang Pernah Ditahan Myanmar



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dascho Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menerima audiensi seorang WNI berinisial AP yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar, di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dascho Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menerima audiensi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

AP didakwa dengan sejumlah pasal serius, yakni Undang-Undang Anti-Terrorisme, Undang-Undang Keimigrasian Myanmar tahun 1947. Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri.

la mengungkapkan bahwa proses pembebasan AP melalui jalur diplomasi memerlukan waktu yang panjang, namun DPR RI berusaha bergerak cepat demi mencegah potensi risiko yang lebih besar. "Alhamdulillah setelah kami bicara di media, semuanya menjadi proaktif untuk membantu. Jangan sampai sudah telat, karena situasi di Myanmar itu sangat tidak pasti, berada di bawah kekuasaan militer," ujar Puan.

Puan juga memberikan nasihat kepada AP agar lebih berhati-hati di masa depan, khususnya dalam memilih tujuan perjalanan dan mematuhi hukum setempat. Ia menyoroti aktivitas AP yang sempat mendokumentasikan tempat-tempat eksotik, yang bisa saja disalahartikan oleh otoritas setempat. **ssb/aha**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analists Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullah, Purnito Pranowo, Singgih Kharanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonorichia Firsta Dysis, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Mun chen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Insan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat Kunres di Lembang, Jawa Barat (26/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran terbuka, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Hal itu ia sampaikan dalam konteks dukungan terhadap keberadaan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh DPR RI melalui bidang Korpolkam, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, untuk merespons berbagai isu ketenagakerjaan.

"Kita ada Satgas terkait tenaga kerja yang dibentuk oleh Wakil Ketua DPR Korpolkam, Pak Dasco. Semua hal yang berkaitan dengan informasi PHK, DPR akan selalu turun dan memediasi," jelas Cucun usai melakukan Kunres di Lembang, Jawa Barat (26/7).

Negara Harus Hadir Tangani PHK

Pentingnya keterlibatan sektor industri dalam program-program pemerintah yang menangani pengangguran, seperti program pra-kerja

Ia menekankan bahwa dalam kasus-kasus PHK, negara harus segera turun tangan untuk mencari solusi, baik melalui intervensi permodalan, akses pemasaran, hingga pelatihan keterampilan bagi korban PHK.

"Kalau proses PHK itu terjadi,

negara harus hadir. Bisa jadi masalahnya akses permodalan atau di marketing. Kita ingin mencari jalan keluarnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Cucun juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor industri dalam program-program pemerintah yang menangani pengangguran, seperti program pra-kerja, yang sebelumnya dijalankan di era Presiden Jokowi.

"Pak Menko PMK punya rencana, misalnya dari pengalaman sebelumnya seperti program pra-kerja, ini semua nanti akan melibatkan sektor industri dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan pengangguran," tutupnya. **aar/aha**



Wapres Perlu Segera Berkantor di IKN

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara. Ia mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di IKN sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan dalam keterangan video yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (24/7).

Menurutnya, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong. Selain itu, kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan

serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan

Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak

pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini

Ia juga menyoroti agar pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya. Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.

uc/rdn

Wakil Ketua DPR RI
Saan Mustopa.



FOTO: ENO/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Skema Transfer Data Tanpa Jaminan Perlindungan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan apresiasi atas capaian proses negosiasi delegasi Indonesia ke AS yang menghasilkan beberapa kesepakatan, utamanya penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS menjadi 19 persen. Namun demikian, terkait dengan salah satu poin dalam kesepakatan yang menyebutkan adanya transfer data WNI ke Amerika Serikat, Sukamta memberikan beberapa catatan.

“Bahwa tim negosiator Indonesia jangan sampai menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama karena AS belum memiliki Undang-Undang Perlindungan

Data Pribadi (UU PDP) di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (24/7).

Diketahui, *General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah peraturan Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk memberikan kendali lebih besar

kepada individu atas data pribadi mereka dan menyederhanakan peraturan untuk bisnis di seluruh UE. Adapun organisasi yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda hingga 4 persen dari omzet tahunan global mereka, atau 20 juta euro, tergantung mana yang lebih besar.

“Tim negosiator Indonesia harus memahami bahwa transfer data pribadi bukan sekadar isu perdagangan, melainkan juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Mekanisme transfer data, lanjutnya, harus tunduk pada UU PDP yang sudah dimiliki, seperti diatur dalam Pasal 56. Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pengelola Data Pribadi harus memperoleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT. **rdn**



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.



FOTO: DOK/PDT

Masa Depan Dana Otsus Aceh

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyoroti pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. Dalam kunjungan reses di Aceh, ia menegaskan bahwa perpanjangan dana tersebut sangat krusial demi menjamin pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Kalau tidak ada dana otsus, bagaimana nasib masyarakat yang selama 20 tahun ini berobat secara gratis?” ujarnya. Ia menilai bahwa pelayanan publik yang ditopang dana Otsus telah memberikan manfaat besar bagi rakyat Aceh dan karenanya harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat. Kata Azis Subekti saat mengikuti kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, (25/7).

Azis Subekti juga menyatakan bahwa Aceh, sebagai daerah dengan status keistimewaan, memiliki kontribusi signifikan terhadap Republik

Kepala daerah jangan berkecil hati, harus inovatif dalam mengajukan program, baik melalui instruksi presiden maupun skema lainnya,

Indonesia. Maka dari itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan Aceh, termasuk aspirasi daerah, sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pusat.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak kepala daerah di Aceh untuk tidak pasif dan menunggu arahan dari pusat. “Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah mendorong belanja daerah. Jadi kepala daerah jangan berkecil hati, harus inovatif dalam mengajukan program, baik melalui instruksi presiden maupun skema lainnya,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, setiap usulan terkait pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus menjadi perhatian utama DPR saat pembahasan anggaran dan legislasi. — **man/aha**

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti saat mengikuti kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, (25/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Penguatan Pencegahan TPPO dan Kekerasan Seksual

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus memberikan perhatian serius terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kasus-kasus TPPO dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus diperkuat aspek pencegahannya. Kami mendorong Kapolda NTT untuk membuka *hotline* khusus agar laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat sebelum menjadi viral,” ujar Stevano saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III mengunjungi Mapolda NTT, Kupang, Jumat (25/7).

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah Kapolda NTT yang telah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah serta organisasi terkait, seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), guna melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap bahaya perdagangan orang.

Stevano juga menekankan bahwa, persoalan TPPO tidak hanya bersumber dari lemahnya penegakan hukum, namun juga berakar dari masalah sosial ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk membuka peluang investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan di NTT.

“TPPO ini bukan semata-mata persoalan hukum. Ada faktor sosial

Persoalan TPPO tidak hanya bersumber dari lemahnya penegakan hukum, namun juga berakar dari masalah sosial ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk membuka peluang investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan di NTT

ekonomi yang harus ditangani. Pemerintah daerah harus mampu menarik investasi agar masyarakat tidak tergoda bekerja secara ilegal di luar negeri,” tegasnya.

Legislator Dapil NTT II ini menilai, bahwa Kapolda NTT yang baru, yang belum genap dua bulan menjabat, menghadapi tantangan berat dalam mengelola persoalan-persoalan hukum yang meresahkan publik. Beberapa kasus bahkan telah menjadi perhatian nasional dan sempat dibahas dalam rapat-rapat di Komisi III.

—jk/aha

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTT, Kupang, Jumat (25/7/2025).



FOTO: JKA/PDT



Soroti Hilirisasi dan Fasilitas UPLAND



Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Kawasan UPLAND di Desa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur, Senin (21/7/2025).

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi bersama tim kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan program UPLAND

(kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif) yang telah dianggarkan cukup besar untuk tahun 2026, yakni sebesar Rp60 miliar yang tersebar di 14 titik lokasi berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan petani.

“Tentu kami ingin melihat secara langsung bagaimana implementasi

program ini dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu ketika melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Kawasan UPLAND di Desa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur, Senin (21/7).

Ia menjelaskan bahwa di Kabupaten Malang, program UPLAND difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah yang tersebar di dua kecamatan dan lima desa dengan luas tanam mencapai lebih dari 200 hektare. “Kami melihat dampaknya cukup terasa, termasuk pada sektor pariwisata, dengan adanya embung dan saluran irigasi yang membantu petani menanam tidak hanya bawang merah, tetapi juga komoditas lain,” tambahnya.

Namun demikian, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah pemasaran hasil panen. Ia juga menyoroti kondisi kandang sapi perah yang kurang memadai dalam mendukung produksi susu untuk program Makan Bergizi Gratis (BMG).

Ia menilai penting adanya ruang steril khusus untuk proses pemerahan agar higienitas terjamin. “Kalau programnya seperti ini, kita perlu siapkan fasilitas pendukung, jangan sampai susu diperah di kandang yang tidak sesuai standar,” jelasnya. — **ica/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: ICA/PDI

Tak Terima Alasan Kurang Personel KSOP



FOTO : STU/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/7/2025).

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kepmenhub atas keselamatan pelayaran. Hal ini menyusul dua kecelakaan laut yang terjadi dalam waktu berdekatan, yaitu tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara.

“Belum selesai kesedihan kita di Tunu Pratama, ini ada lagi KM Barcelona yang terbakar di Manado, Sulawesi, dengan beberapa masalah,” ujar Anggota

Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/7).

Ia menyoroti hasil awal investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menemukan adanya pembiaran terhadap prosedur pemeriksaan kapal sebelum berangkat. Hamka menyebut bahwa pengawasan kelayakan kapal merupakan tanggung jawab mutlak KSOP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, khususnya Pasal 207 dan 208.

“Saya tidak bisa menerima kalau alasan tidak ada personel. Saya

tidak bisa terima kalau dilimpahkan kepada orang tetapi tidak mengikuti pertanggungjawaban. Yang namanya KSOP, Kementerian Perhubungan itu bertanggung jawab berdasarkan undang-undang,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jika pelimpahan tugas kepada pihak lain dilakukan, maka Kementerian Perhubungan sebagai regulator tetap harus mengawasi dan memastikan tanggung jawab tetap berjalan. Ia juga menyoroti kapal yang berangkat saat ia melakukan kunjungan lapangan, yang menurutnya telah mengalami kelebihan muatan. **est/rdn**



Soroti Ketertinggalan Infrastruktur Papua Barat Daya

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti masih minimnya infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya. Anggia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat Papua Barat Daya memiliki peran vital dalam mendukung

Daerah tidak bisa hanya bersikap menunggu perhatian atau bantuan dari pusat tanpa terlebih dahulu menunjukkan urgensi dan peta kebutuhan nyata di lapangan.

visi pemerataan pembangunan nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Jadi ini kita lagi ikut di Papua Barat Daya, provinsi yang baru. Yang menurut saya ini penting untuk dijadikan perhatian. Karena ternyata masih banyak infrastruktur yang belum tersedia, terutama untuk bisnis keuangan, jaringan telekomunikasi, dan listrik itu perlu perhatian,” kata Anggia dalam



Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin langsung kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (25/7/2025).

keterangannya usai memimpin langsung kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Kota Sorong,

Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (25/7).

Anggia menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur tersebut memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, serta menghambat minat investasi dari pihak swasta. Tanpa dukungan sarana dan prasarana dasar seperti jaringan keuangan yang inklusif, konektivitas telekomunikasi, dan pasokan listrik yang andal, maka sulit untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Ketimpangan pembangunan antarwilayah pun akan semakin melebar jika tidak segera diatasi.

Ia menekankan pentingnya peran proaktif pemerintah daerah dalam menyuarakan kebutuhan wilayahnya secara jelas, terstruktur, dan berkelanjutan. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya bersikap menunggu perhatian atau bantuan dari pusat tanpa terlebih dahulu menunjukkan urgensi dan peta kebutuhan nyata di lapangan.

“Makanya saya minta nanti pemerintah daerah untuk proaktif, menyampaikan apa yang dibutuhkan. Kalau itu disampaikan dengan benar dan terstruktur, tentu Komisi VI akan *men-support*,” tegasnya. — **ysm/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Dukung Revitalisasi Istana Siak

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan dukungannya terhadap usulan revitalisasi Istana Siak yang berada provinsi Riau. Menurutnya, Istana Siak memiliki nilai historis dan budaya tinggi sebagai simbol kejayaan Melayu yang masih kuat hingga kini.

Ia menegaskan bahwa istana tersebut adalah salah satu yang unik di Indonesia, dengan daya tarik yang khas dan berpotensi besar untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

“Tidak banyak di Indonesia istana seperti ini. Mungkin satu-satunya yang punya kekhasan budaya Melayu yang kuat. Proposal untuk revitalisasi tadi sudah diserahkan langsung kepada Kementerian Pariwisata. Kami di DPR akan ikut mengawal,” kata



Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat memimpin kunjungan kerja Komisi VII ke Kabupaten Siak, Jumat (25/7/2025).

Saleh dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Kabupaten Siak, Jumat (25/7).

Menurutnya, revitalisasi yang ditaksir memerlukan anggaran sekitar Rp10-12 miliar itu bukan sekadar renovasi fisik, melainkan investasi budaya yang berdampak luas. Ia optimis, kondisi istana yang bagus nantinya mampu menarik wisatawan.

“Karena bila istana berhasil direvitalisasi, daya tarik wisata meningkat, kunjungan bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” imbuhnya.

Tak hanya infrastruktur, Saleh juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM lokal, termasuk perbaikan kemasan produk dan pelatihan keterampilan. Ia mendorong kolaborasi antara Pemkab Siak, DPR, dan kementerian terkait agar UMKM bisa naik kelas.

Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa Siak memiliki posisi strategis, baik dari sisi sejarah Melayu maupun dari letak geografis yang dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ia berharap konektivitas dan kerja sama antarnegara bisa dimaksimalkan untuk kemajuan daerah. — **hal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Langkah Nyata Putus Rantai Kemiskinan



FOTO: QQ/PDT

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, bersama tim saat melakukan peninjauan langsung ke Sentra Abiseka, Kementerian Sosial, di Pekanbaru, Riau, Jumat (25/7/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

“Di Komisi VIII kami sudah bolak-balik berkeinginan memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah, begitu Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, langsung beliau mewujudkan untuk sekolah rakyat,”

ujar Marwan saat melakukan peninjauan langsung ke Sentra Abiseka, Kementerian Sosial, di Pekanbaru, Riau, Jumat (25/7).

Marwan menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati pendidikan secara layak. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

“Sekalipun namanya wajib sekolah, wajib belajar 12 tahun, tapi nyatanya banyak lagi anak-anak yang

tidak sekolah. Bagaimana caranya supaya memutus rantai kemiskinan, salah satunya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa,” jelasnya.

Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Sosial menyambut positif pelaksanaan Sekolah Rakyat dan memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem benar-benar menjadi prioritas penerima manfaat.

“Kami cukup bergembira dengan keadaan ini, bahwa anak-anak ini kita tampung di tempat yang layak. Di ruangan belajar, dengan guru-guru yang punya kecerdasan, bisa mengayomi, karena ini tidak mudah,” tambahnya. **qq/aha**



Turunkan Angka Pengangguran Muda

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

“Di Komisi VIII kami sudah bolak-balik berkeinginan memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah, begitu Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, langsung beliau mewujudkan untuk sekolah rakyat,” ujar Marwan saat melakukan peninjauan langsung ke Sentra Abhiseka, Kementerian Sosial, di Pekanbaru, Riau, Jumat (25/7).

Marwan menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati pendidikan secara

layak. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam

Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial menyambut positif pelaksanaan Sekolah Rakyat dan memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem benar-benar menjadi prioritas penerima manfaat.

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

“Sekalipun namanya wajib sekolah, wajib belajar 12 tahun, tapi nyatanya banyak lagi anak-anak yang tidak sekolah. Bagaimana caranya supaya memutus rantai kemiskinan, salah satunya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa,” jelasnya.

Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial menyambut positif pelaksanaan Sekolah Rakyat dan memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem benar-benar menjadi prioritas penerima manfaat.

“Kami cukup bergembira dengan keadaan ini, bahwa anak-anak ini kita tampung di tempat yang layak. Di ruangan belajar, dengan guru-guru yang punya kecerdasan, bisa mengayomi, karena ini tidak mudah,” pungkasnya. — **qq/aha**

Anggota Komisi IX
DPR RI Nurhadi.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Penataan Ulang DAK untuk Revitalisasi Sekolah



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X foto bersama dengan Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta Dirjen Dikti Kemendiksisaintek dan para civitas akademika di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Jumat (25/07/2025).

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyoroti persoalan ketimpangan dalam revitalisasi sekolah saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Banda Aceh, Aceh. Ledia menyampaikan bahwa meskipun Banda Aceh memiliki potensi besar sebagai kota di ujung barat Indonesia, daerah ini masih menghadapi keterbatasan dalam pembenahan infrastruktur pendidikan.

“Kalau kita lihat sesungguhnya, Banda Aceh ini menjadi satu kota di ujung barat Indonesia yang potensial untuk berkembangnya banyak. Tetapi juga punya sejumlah persoalan, misalnya ketika kita bicara tentang revitalisasi sekolah. Ternyata revitalisasi sekolah yang didapat oleh Banda Aceh itu hanya 6

Pemetaan ini harus dapat mengidentifikasi kondisi bangunan sekolah, mulai dari rusak ringan hingga yang benar-benar memerlukan revitalisasi menyeluruh.

SD dan 1 SMP, kebutuhannya lebih banyak,” kata Ledia di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Jumat (25/7).

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Banda Aceh, melainkan juga di sejumlah daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang terhadap skema Dana Alokasi

Khusus (DAK) agar distribusi anggaran revitalisasi sekolah lebih merata dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ledia mengingatkan pentingnya pemetaan yang akurat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemetaan ini harus dapat mengidentifikasi kondisi bangunan sekolah, mulai dari rusak ringan hingga yang benar-benar memerlukan revitalisasi menyeluruh.

Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun 2018, Komisi X DPR RI telah menghasilkan laporan dari Panitia Kerja (Panja) Sarana dan Prasarana Pendidikan yang menyebutkan adanya 1,4 juta ruang kelas dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Namun hingga saat ini, persoalan tersebut belum terselesaikan secara tuntas. **mun/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Perlu Diversifikasi Energi Terbarukan

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong PT. Geo Dipa Energi tidak hanya berfokus pada pengembangan energi panas bumi (geothermal), tetapi juga mengoptimalkan potensi energi terbarukan lainnya seperti tenaga air, biomassa, dan tenaga surya.

Didik menilai bahwa potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu sorotan utama adalah pemanfaatan panas bumi yang baru mencapai sekitar 2,5 gigawatt (GW) dari total potensi sekitar 23–24 GW, atau baru sekitar 10 persen.

“Kita perlu pikirkan bagaimana menduplikasi model pengembangan geothermal

seperti di Dieng atau Patuha ke wilayah lain. Tapi kita juga harus mempertimbangkan potensi energi terbarukan lainnya yang secara teknologi lebih cepat dan biaya

Harga jual listrik dari berbagai jenis pembangkit energi terbarukan ke PLN saat ini relatif setara

investasi lebih murah” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat RDP Komisi XI dengan Dirut PT. Geo Dipa Energi di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).

Dalam kesempatan itu, disampaikan pula bahwa harga jual listrik dari berbagai jenis pembangkit energi terbarukan ke PLN saat ini relatif setara. Hal ini membuka peluang untuk mendorong pemanfaatan energi seperti *hydropower*, biomassa, dan panel surya yang secara teknologi dinilai lebih sederhana dan memiliki risiko investasi yang lebih rendah dibandingkan geothermal.

“Toh teknologi tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya pada boiler dan eksplorasi pengeboran. Tapi kalau dari sisi pekerjaan, lebih cepat dan lebih murah,” pungkasnya.

Didik juga mengingatkan bahwa bauran energi baru dan terbarukan Indonesia masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Saat ini, bauran energi baru dan terbarukan baru mencapai 11 persen, jauh dari target 23 persen pada 2025.

— fa/rdn

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi saat RDP Komisi XI dengan Dirut PT. Geo Dipa Energi di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya





Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, saat meninjau warga binaan di Balai Pemasarakatan Kelas II, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Keterampilan Menuju Reintegrasi Sosial

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, menyampaikan apresiasinya terhadap program pembinaan di Balai Pemasarakatan yang dinilai efektif dalam mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan Kerja Reses Komisi XIII untuk melihat langsung proses pembinaan dan pelatihan terhadap warga binaan di Sultra.

“Kehadiran kami, dari Komisi XIII itu butuh melihat secara pasti dan makanya kita datang wawancara mereka. Tanya jawab dan wawancara mereka, bertukar

pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja,” kata Ali Mazi di Balai Pemasarakatan Kelas II, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7).

Ali Mazi menekankan pentingnya pembinaan sosial bagi warga binaan yang telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Menurutnya, proses tersebut harus menjadi masa transisi untuk belajar bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat agar ketika bebas, mereka tidak lagi merasa canggung atau terasing.

“Mereka harus beradaptasi lagi. Jadi, mereka ibaratnya belajar dahulu. Belajar bersosialisasi, berintegrasi sesuai mementingkan

dengan masyarakat setempat itu,” jelasnya.

Ia pun menilai pembinaan di lapas yang dikunjunginya sudah menunjukkan hasil positif. Perubahan mental dan moral terlihat nyata berkat adanya bimbingan yang intensif dari pihak lapas.

Ali Mazi juga mendorong agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pemasarakatan melakukan sosialisasi pembinaan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia. Hal ini menurutnya penting mengingat Indonesia masih kerap mengandalkan tenaga kerja dari luar yang belum tentu memberikan kinerja optimal. **aas/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua BURT DPR RI, Novita Wijayanti, saat foto bersama dengan tim dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit Hermina Banda Aceh di Provinsi Banda Aceh, Selasa (22/7/2025).

Semakin Kompeten Layani Masyarakat

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengunjungi Rumah Sakit Hermina Banda Aceh. Meskipun masih mempunyai status sebagai rumah sakit tipe-D, namun Rumah Sakit Hermina Banda Aceh tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tak hanya bagi Anggota DPR saja tetapi bagi masyarakat sekitar yang berada di Banda Aceh.

Wakil Ketua BURT DPR RI, Novita Wijayanti, menyoroti kondisi Rumah Sakit Hermina Banda Aceh yang meskipun termasuk dalam kategori rumah sakit baru, tetapi mempunyai komitmen yang baik dalam meningkatkan segala aspek untuk menunjang pelayanan kesehatan.



Tak hanya pada sarana prasarana tetapi juga pada aspek provider khususnya program Jamkestama yang tersedia yang mana dapat memudahkan bagi para pasien untuk berobat.

“Seperti yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Hermina ini merupakan rumah sakit yang sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kami dari BURT sengaja ingin melihat rumah sakit yang masih baru juga providernya yang tergolong juga baru, untuk melihat bagaimana fasilitasnya kemudian bagaimana dokternya dan kemudian bagaimana pelayanan kepada baik Anggota DPR RI serta masyarakat di sekitar rumah sakit tersebut.” ujar Novita dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit Hermina Banda Aceh di Provinsi Banda Aceh, Selasa (22/7).

Meskipun lebih dikenal sebagai rumah sakit ibu dan anak, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap Rumah Sakit Hermina ini juga menerima pasien dengan penyakit ataupun kondisi tertentu. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang akan memilih rumah sakit lokal dibandingkan harus pergi ke rumah sakit di luar negeri. **mfn/aha**



DPR & Parlemen Uruguay Perkuat Kerja Sama



Ketua GKSAP DPR RI – Parlemen Uruguay Yan Permenas Mandenas saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales, di Ruang Lounge BKSAP, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSAP) DPR RI – Parlemen Uruguay Yan Permenas Mandenas menegaskan komitmen BKSAP DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Uruguay dalam berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan tersebut, Yan Permenas Mandenas menggarisbawahi beberapa prioritas utama yang tengah dijajaki bersama, mulai dari kerja sama pertanian, olahraga, hingga peningkatan hubungan di bidang sosial politik.

“Kami menyambut baik inisiatif kerja sama pertanian yang sudah dijajaki oleh Dubes Uruguay dengan

Kementerian Pertanian. Uruguay dikenal sukses di sektor ini, meski dengan wilayah kecil,” ujar Yan Permenas Mandenas di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).

Tak hanya itu, menariknya Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan adanya kabar baik rencana uji tanding (*friendly match*) antara Tim Nasional Uruguay dan Indonesia menjelang Piala Dunia juga menjadi sorotan, sebagai bagian dari diplomasi olahraga. Di sisi lain, GKSAP turut mendorong kebijakan bebas visa antar negara sebagai bagian dari penguatan relasi politik dan mobilitas warga.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diarahkan pada isu-isu strategis lainnya seperti transfer teknologi di sektor pertanian, ketahanan pangan, serta pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan.

GKSAP DPR RI juga berencana melakukan kunjungan balasan ke Uruguay dalam waktu sekitar sebulan ke depan. Kunjungan ini akan dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan dengan parlemen dan pemerintah Uruguay. “Kami akan bertukar informasi dan mendalami potensi kerja sama di sektor industri, perdagangan, ekonomi, hingga politik,” tutur Yan Permenas Mandenas. **pun/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Minta Penjelasan Posisi BPKP

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, meminta kejelasan posisi dan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara. Merujuk pada ringkasan prosedur audit, ia menyebut bahwa BPKP fokus pada perhitungan nilai kerugian pemerintahan negara, dan tidak mencakup kerugian negara secara keseluruhan.

“Jadi ini yang mungkin tampaknya perlu dijelaskan supaya menjadi jelas kedudukannya,” kata Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN DPR RI dan BPKP, di Gedung Nusantara II

DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7).

Andreas mencontohkan seperti data dari sistem informasi IABS (Implementasi Automatic Blocking

Data dari IABS BPKP semester kedua itu masih menyebut potensi kerugian yang dari PT Timah itu yang ilegal tadi, potensi menyebutkan 2019–2022 itu 34,5 triliun. Kita mendapatkan perhitungan yang dari BPKP yaitu 29,1 triliun

System) BPK semester kedua. Data itu menyebutkan bahwa potensi kerugian negara dari kasus ilegal terkait PT Timah selama periode 2019–2022 tercatat sebesar Rp34,5 triliun. Namun, dari perhitungan yang diterima BAKN dari BPKP, nilai kerugiannya hanya sebesar Rp29,1 triliun.

“Jadi kami ini mendapatkan data dari IABS BPK semester kedua itu masih menyebut potensi kerugian yang dari PT Timah itu yang ilegal tadi, potensi menyebutkan 2019–2022 itu 34,5 triliun. Kita mendapatkan perhitungan yang dari BPKP yaitu 29,1 triliun,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya kerugian senilai Rp271 triliun, namun menurutnya angka itu berasal dari entitas lain di luar ranah BPKP. Ia menekankan pentingnya klarifikasi posisi dan batas kewenangan BPKP dalam menangani data kerugian negara, mengingat BAKN menerima berbagai versi data dari banyak sumber. — **hal/aha**



FOTO: ALM/PDI

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN DPR RI dan BPKP, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin dalam foto bersama usai Sosialisasi TNKB di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/7/2025).

Jaga Marwah DPR RI

Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin ingin memastikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk anggota DPR RI sudah tersosialisasikan dengan baik kepada jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surabaya. Hal itu disampaikan usai MKD melakukan Sosialisasi TNKB di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/7).

“Kedatangan kami, MKD DPR RI ke Polrestabes Surabaya ini untuk

memastikan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk anggota DPR RI sudah tersosialisasikan dengan baik. Mengingat semakin banyak pihak lain yang memalsukan TNKB anggota DPR RI untuk kepentingan pribadinya,” ujar Imron.

Pemalsuan tersebut, lanjut Imron jelas sangat merugikan DPR RI secara kelembagaan. Padahal tujuan utama penggunaan TNKB khusus anggota DPR RI selain sebagai bagian dari hak keprotokoleran, juga sebagai identifikasi anggota DPR RI dalam menjalankan serta mendukung tugas dan fungsi dewan. Bukan

untuk menunjukkan keistimewaan atau gaya-gayaan.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, dalam sosialisasi tersebut juga menjelaskan terkait tugas dan fungsi MKD DPR RI sebagai pengawas etika anggota dewan, termasuk sikap, bicara serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara yang semuanya ada dalam aturan dan tata tertib DPR RI. Hal itu semata untuk menjaga marwah dan martabat dari lembaga DPR RI secara keseluruhan.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Fraksi PKS ini, sosialisasi TNKB itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara lembaga legislatif dan aparat kepolisian terkait regulasi dan etika penggunaan TNKB khusus tersebut.

ayu/rdn



Desa Masuk Kawasan Hutan Perlu Diselesaikan

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan desa yang masuk dalam kawasan hutan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan antara kementerian. Hal itu disampaikannya saat

mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Desa Masuk Kawasan Hutan: Menata Ulang Tata Ruang dan Keadilan Agraria” di Jakarta, Rabu (23/7).

“Kita tadi berbicara, Kementerian Kehutanan punya masalah dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri karena banyak desa-desa masuk kawasan hutan. Ada masalah juga

dengan Kementerian ATR karena banyak sertifikat tanah yang juga masuk dalam kawasan hutan. Bahkan dengan Kementerian Transmigrasi, karena banyak lahan transmigrasi yang terdampak. Jadi, problem utamanya ada pada Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pihaknya bersama para pemangku kepentingan telah bersepakat pada tiga hal pokok sebagai solusi. Pertama, seluruh desa yang masuk kawasan hutan harus dikeluarkan dari kawasan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Kedua, Adian menekankan bahwa semua tanah bersertifikat yang statusnya sudah ada sebelum penetapan kawasan hutan, harus tetap diakui legalitasnya dan dikeluarkan dari kawasan hutan. “Ketiga, lahan-lahan transmigrasi yang sudah memiliki sertifikat dan masuk kawasan hutan juga harus dikeluarkan. Bagi yang belum bersertifikat karena masuk kawasan hutan, segera dikeluarkan dan diberikan sertifikatnya,” tambah Adian.

Legislator Dapil Jabar V ini menyoroti dampak serius tumpang tindih tersebut terhadap pembangunan di desa. Kepala desa, kata Adian, kerap menghadapi dilema ketika hendak membangun infrastruktur karena khawatir berurusan dengan persoalan hukum. ➡ **pdt/aha**

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Desa Masuk Kawasan Hutan: Menata Ulang Tata Ruang dan Keadilan Agraria” di Jakarta, Rabu (23/7/2025).



FOTO: PRIMA



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polda NTT yang dinilai telah menunjukkan integritas tinggi. Hal itu ia sampaikan saat Komisi III melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kupang, NTT, Jumat (25/7/2025). Foto: Jka/Aha

Beranda Ami



SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI

[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)



TVR PARLEMEN

